



PERANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM OPTIMALISASI RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BANDUNG

Muchamad Fajri¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Permasalahan lingkungan perkotaan di Kota Bandung semakin kompleks seiring meningkatnya kepadatan penduduk dan pesatnya pembangunan fisik, yang berdampak pada keterbatasan dan penurunan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya peranan pemerintah daerah, khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung, dalam pengelolaan dan optimalisasi RTH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan DPKP Kota Bandung dalam optimalisasi RTH sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan DPKP telah dijalankan melalui dimensi kontrol sosial, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, peranan tersebut belum berjalan optimal karena keterbatasan kewenangan penegakan hukum, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi RTH di Kota Bandung memerlukan penguatan peranan DPKP secara terintegrasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pengembangan pola pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Kata Kunci: Peranan Pemerintah, Ruang Terbuka Hijau, Kualitas Lingkungan Hidup, DPKP Kota Bandung

Abstract

Urban environmental problems in Bandung City have become increasingly complex due to rapid population growth and intensive physical development, which have reduced the availability and quality of Green Open Spaces (GOS). This condition indicates that the role of the local government, particularly the Housing and Settlement Areas Office (DPKP) of Bandung City, has not been optimized in managing and developing green open spaces. This study aims to analyze the role of DPKP Bandung City in optimizing green open spaces as an effort to improve environmental quality. The research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The

results indicate that DPKP has performed its role through the dimensions of social control, public service, and community empowerment. However, these roles have not been fully optimized due to limited authority in law enforcement, limited resources, and low community participation. The study concludes that optimizing green open spaces in Bandung City requires strengthening the integrated role of DPKP, enhancing cross-sectoral coordination, and developing sustainable community empowerment strategies to improve environmental quality.

Keywords: *Government Role, Green Open Space, Environmental Quality, DPKP Bandung City*

PENDAHULUAN

Pembangunan perkotaan merupakan proses yang terus berlangsung seiring meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan hunian, serta berkembangnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Di satu sisi, pembangunan membawa dampak positif bagi pertumbuhan kota, namun di sisi lain juga menimbulkan tekanan serius terhadap lingkungan hidup. Salah satu persoalan penting yang muncul adalah semakin berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga ekologis, ruang sosial, serta penunjang kualitas hidup masyarakat perkotaan. Kondisi ini menuntut adanya pengelolaan lingkungan yang terencana agar pembangunan kota tetap berjalan tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem.

Kota Bandung sebagai kota metropolitan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi menghadapi tantangan besar dalam menjaga ketersediaan ruang hijau. Pertumbuhan kawasan permukiman, pusat perdagangan, serta infrastruktur perkotaan berlangsung pesat dan secara tidak langsung mengurangi proporsi RTH. Data menunjukkan bahwa luasan RTH Kota Bandung masih berada jauh di bawah ketentuan minimal 30% sebagaimana diamanatkan dalam UU 26 2007. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, seperti peningkatan suhu kota, berkurangnya daya serap air, serta menurunnya kualitas udara akibat rendahnya tutupan vegetasi. Dengan demikian, persoalan RTH bukan sekadar isu tata ruang, melainkan telah menjadi isu lingkungan hidup perkotaan.

Fenomena tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam mengelola ruang kota. Dalam struktur kelembagaan, Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung memiliki tanggung jawab dalam penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan ruang terbuka hijau. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti penambahan taman kota, pemanfaatan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta pemeliharaan ruang terbuka publik. Namun, peningkatan luasan RTH masih berjalan lambat dan belum mampu mengejar kebutuhan ekologis kota. Implementasi kebijakan di bidang RTH juga menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi keterbatasan kewenangan, sumber daya, koordinasi lintas sektor, maupun partisipasi masyarakat.

Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa peranan pemerintah daerah tidak hanya dilihat sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai aktor yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Peran DPKP menjadi penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana kebijakan ruang terbuka hijau diterjemahkan dalam praktik. Kesenjangan antara kebijakan dan kondisi faktual RTH di lapangan memperlihatkan adanya tantangan dalam optimalisasi peran kelembagaan pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis peranan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung dalam optimalisasi Ruang Terbuka Hijau sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup. Fokus penelitian menitikberatkan pada bagaimana peran tersebut dijalankan, faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi, serta bagaimana dampaknya terhadap upaya perbaikan kualitas lingkungan perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi guna memperoleh gambaran yang mendalam mengenai dinamika peran kelembagaan dalam pengelolaan RTH. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam kajian peranan pemerintah daerah, serta secara praktis menjadi masukan bagi pemerintah Kota Bandung dalam memperkuat kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau yang lebih efektif dan berkelanjutan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis peranan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung dalam optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai proses, makna, serta dinamika kelembagaan yang terjadi dalam praktik pengelolaan RTH, sehingga realitas sosial dan administratif dapat dipahami secara kontekstual. Penelitian kualitatif bertujuan mengungkap fenomena secara menyeluruh dengan peneliti sebagai instrumen kunci dalam memahami makna di balik data yang diperoleh (Sugiyono, 2015).

Unit analisis penelitian adalah DPKP Kota Bandung sebagai perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Informan penelitian ditentukan secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan RTH, baik pada level pengambil kebijakan maupun pelaksana teknis. Teknik purposive digunakan agar data yang diperoleh benar-benar relevan dengan fokus penelitian serta mampu menggambarkan peran kelembagaan secara mendalam.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan peran, kendala, serta upaya optimalisasi RTH. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi faktual ruang terbuka hijau dan praktik pengelolaannya, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelaah kebijakan serta data kelembagaan pendukung. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis, sebagaimana model analisis interaktif yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif (Miles, Huberman, & Saldaña). Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat keandalan serta kesesuaian dengan kondisi lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menggambarkan secara

komprehensif realitas peran kelembagaan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bandung.

PEMBAHASAN

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan elemen penting dalam kebijakan penataan ruang perkotaan karena berfungsi menjaga keseimbangan ekologis sekaligus menunjang kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks Kota Bandung, keberadaan RTH diatur melalui kebijakan tata ruang daerah yang menempatkan ruang hijau sebagai bagian dari sistem lingkungan perkotaan berkelanjutan. Namun, kondisi aktual menunjukkan bahwa proporsi RTH masih jauh di bawah ketentuan ideal, sehingga memunculkan persoalan ekologis seperti peningkatan suhu kota, berkurangnya daya resap air, serta menurunnya kualitas udara. Situasi ini menempatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung pada posisi strategis sebagai perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan optimalisasi RTH.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan peran DPKP dalam optimalisasi RTH belum berjalan sepenuhnya efektif. Dari dimensi kontrol sosial, fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan lahan dan perlindungan ruang hijau masih menghadapi berbagai kendala. Pengendalian terhadap perubahan fungsi lahan belum maksimal karena kewenangan penegakan hukum tidak sepenuhnya berada pada DPKP, sehingga peran pengawasan lebih bersifat koordinatif dibanding represif. Selain itu, keterbatasan jumlah personel pengawas serta luasnya wilayah pengelolaan berdampak pada belum optimalnya pemantauan kondisi RTH.

Pada dimensi pelayanan publik, DPKP telah berupaya menyediakan dan memelihara taman kota serta ruang terbuka publik sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Taman kota berfungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, sekaligus penunjang kualitas udara perkotaan. Masyarakat merasakan manfaat langsung dari keberadaan RTH publik tersebut. Akan tetapi, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana pemeliharaan mempengaruhi kualitas layanan. Peningkatan luasan

RTH setiap tahun relatif kecil dibanding kebutuhan ekologis kota yang terus berkembang.

Sementara itu, pada dimensi pemberdayaan masyarakat, DPKP telah membuka ruang partisipasi warga dalam menjaga dan memanfaatkan RTH melalui kegiatan pemeliharaan berbasis komunitas. Upaya ini menunjukkan bahwa pengelolaan RTH tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Namun, tingkat partisipasi masyarakat belum merata karena masih rendahnya kesadaran lingkungan dan terbatasnya komunikasi kebijakan. Kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami pentingnya RTH sebagai penopang kualitas lingkungan hidup.

Dari sisi kelembagaan, koordinasi antarperangkat daerah yang berkaitan dengan tata ruang dan lingkungan hidup belum sepenuhnya terintegrasi. Pengelolaan RTH melibatkan berbagai instansi, sehingga tanpa sinergi yang kuat, pelaksanaan kebijakan cenderung berjalan parsial. Dalam perspektif ilmu pemerintahan, kondisi ini mencerminkan tantangan kapasitas birokrasi dalam menjalankan fungsi kolaboratif. Ketika koordinasi belum optimal, perlindungan dan pengembangan RTH menjadi kurang efektif.

Faktor penghambat lainnya adalah besarnya tekanan pembangunan kota. Pertumbuhan penduduk serta kebutuhan ruang aktivitas ekonomi mendorong prioritas kebijakan lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik dibanding pelestarian ruang hijau. Situasi ini menunjukkan adanya kecenderungan orientasi pembangunan jangka pendek yang belum sepenuhnya seimbang dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Dampaknya mulai terlihat melalui meningkatnya kepadatan kawasan, berkurangnya daya resap air, serta penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan.

Dampak dari kondisi tersebut telah dirasakan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berkurangnya fungsi ekologis ruang kota berkontribusi pada peningkatan suhu udara, menurunnya kenyamanan lingkungan, serta potensi genangan air di beberapa kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang belum diimplementasikan secara

optimal berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan baru di masa mendatang.

Jika dikaji dari perspektif peranan pemerintah, pelaksanaan fungsi kontrol sosial, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat oleh DPKP telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi. Keterbatasan sumber daya, koordinasi, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas keseluruhan peran kelembagaan. Meskipun terdapat dukungan berupa kerangka kebijakan dan program pengelolaan RTH, faktor penghambat yang lebih dominan menyebabkan hasil yang dicapai belum maksimal.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi RTH memerlukan pendekatan kolaboratif. Pemerintah daerah perlu memperkuat komunikasi publik, meningkatkan kapasitas pengawasan, serta mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih aktif dalam pemeliharaan ruang hijau. Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar kebijakan pengelolaan RTH tidak hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik pengelolaan kota.

Selain itu, pemanfaatan inovasi seperti edukasi berbasis komunitas dan penguatan peran kelembagaan lokal dapat menjadi strategi pendukung dalam menjaga keberlanjutan ruang terbuka hijau. Pengelolaan RTH yang efektif tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada komitmen aparatur serta dukungan sosial masyarakat.

Konsekuensi dari lemahnya implementasi kebijakan ini semakin terasa dalam aspek sosial-ekologis. Ruang terbuka hijau yang seharusnya menjadi penopang kualitas lingkungan kota belum mampu berfungsi secara maksimal. Jika kondisi ini terus berlangsung, risiko penurunan kualitas lingkungan hidup akan semakin besar.

Dengan demikian, pembahasan mengenai pengelolaan RTH di Kota Bandung menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat sebagai strategi untuk menyeimbangkan pembangunan kota dengan keberlanjutan lingkungan. Optimalisasi ruang terbuka hijau menjadi

langkah penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup perkotaan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung dalam optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup belum terlaksana secara maksimal. Meskipun kebijakan dan program pengelolaan RTH telah memiliki landasan regulatif yang jelas dalam perencanaan tata ruang daerah, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait keterbatasan kapasitas kelembagaan, pengawasan, serta partisipasi masyarakat.

Upaya penyediaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau telah dilakukan, namun belum mampu mengimbangi tekanan pembangunan perkotaan yang terus meningkat. Pertumbuhan kawasan terbangun dan kebutuhan ruang aktivitas masyarakat berdampak pada terbatasnya pengembangan RTH baru. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya fungsi ekologis kota, seperti berkurangnya daya resap air, peningkatan suhu lingkungan, serta penurunan kualitas udara. Situasi tersebut diperparah oleh belum optimalnya sosialisasi kebijakan dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ruang hijau, serta koordinasi antarinstansi yang belum berjalan secara terpadu.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi RTH tidak dapat hanya mengandalkan peranan pemerintah daerah semata, tetapi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Keberhasilan pengelolaan ruang terbuka hijau sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor, penguatan kapasitas aparatur, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan fungsi pengawasan, penguatan koordinasi kelembagaan, serta pengembangan strategi pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan agar pengelolaan RTH dapat berjalan seimbang dengan dinamika pembangunan kota dan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F., 2018. Konsep ruang terbuka hijau dalam pembangunan kota berkelanjutan.
- Aristo, 2023. Fungsi ekologis ruang terbuka hijau dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- Astriani, 2015. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bandung.
- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jawa Barat, 2023. Data curah hujan Jawa Barat.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2020. *Kota Bandung dalam angka 2020*. Bandung: BPS.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2025. *Kota Bandung dalam angka 2025*. Bandung: BPS.
- Budihardjo, E. & Sudanti, H., 2009. *Kota berkelanjutan*. Bandung: Alumni.
- CR Journal, 2023. Analisis daya serap karbon dioksida ruang terbuka hijau perkotaan terhadap emisi transportasi di Kota Bandung. *CR Journal*, 9(2).
- Dewiyanti, D., 2011. Ruang terbuka hijau sebagai ruang sosial kota.
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung, 2020. Data potensi ruang terbuka hijau Kota Bandung. Bandung: DPKP.
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung, 2023. Data luas ruang terbuka hijau Kota Bandung. Bandung: DPKP.
- Dwiyanto, A., 2009. Fungsi ekologis ruang terbuka hijau dalam sistem hidrologi kota.
- Ernawati, 2015. Fungsi ekologis ruang terbuka hijau publik di Surabaya.
- Faisal, 2023. Ruang terbuka hijau sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.
- Fatimah, Sinukaban & Munandar, 2013. Nilai ekologis ruang terbuka hijau dalam penyerapan karbon.
- Hakim, R., 2012. Fungsi dan manfaat ruang terbuka hijau dalam kota.
- Irmadella, 2018. Kolaborasi multi-stakeholder dalam pengelolaan taman kota Surabaya.

- Mashur & Rusli, 2018. Tanggung jawab ekologis pemerintah dalam penyediaan RTH.
- Nurini & Susilowati, 2013. Ruang terbuka hijau dalam konsep eco-cultural city.
- Peraturan Menteri PUPR No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Wali Kota Bandung tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.
- Putri, 2019. Permasalahan pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan.
- Rahardja, 2022. Ruang terbuka hijau sebagai hak warga atas lingkungan hidup.
- Rahmawati, 2017. Koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan perkotaan.
- Suripin, 2014. *Sistem drainase perkotaan berkelanjutan*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Widati, 2024. Ruang terbuka hijau dalam pengendalian urban heat island.